

Menakar Kondusifitas Pemiluakada Serentak

Oleh Dr Nispul Khoiri, MA

Kalau logika berpikir kita berasumsi Pemiluakada serentak dapat meredam konflik karena dirancang secara sistematis dan terfokus serentak, tidak dikesampingkan pula kepastian keterbukaan konflik

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemiluakada) serentak gelombang pertama dimulai Desember 2015. Tercatat 9 provinsi, 224 kota dan 36 Kabupaten menngelar pathetetan akbar ini, tanpa terkecuali Provinsi Sumatera Utara (Sumut), terdapat 14 Kab/Kota yaitu: Medan, Serdangbedagai, Tapanuli Selatan, Tobasamosir, Binjai, Labuhanbatu, Asahan, Sibolga, Pakpak Bharat, Humbanghasundutan, Samosir, Pematangsiantar, Simalungun dan Labuhanbatu Utara.

Berbagai kalangan-pun menyambut positif Pemiluakada serentak, paling tidak tersimpul pemikiran kegiatan ini sebagai proses langkah maju lagi dari sistem demokrasi Indonesia. Implikasinya turut mengefisienkan *cost* politik sebelumnya relatif besar dan meminimalisir konflik serta ketidakpastian hukum. Pemiluakada serentak membentuk sinkronisasi penyelenggaraan Pemilu berjalan efektif. Sayangnya inilah yang dicita-citakan masyarakat dan bangsa ini akan tampilan negara-daerah berdemokrasi, membangun harmonisasi yang santun bukan konflik ataupun pertikaian.

Di balik optimisnya memajukan demokrasi, di saat kemajuan meminimalisir konflik, belajar dari Pemiluakada sebelumnya, dimana sejak tahun 2010 terdapat 224 daerah menyelenggarakan Pemiluakada sebanyak 73 persen prosesnya bermasalah dan diwarnai proses gugatan. Ini menunjukkan tidak ada Pemiluakada tanpa konflik. Kalau logika berpikir kita berasumsi Pemiluakada serentak dapat meredam konflik karena dirancang secara sistematis dan terfokus serentak, tidak dikesampingkan pula kepastian keterbukaan konflik. Sayangnya keserempakan Pemiluakada lebih menunjukkan menyulut gelombang baru, karena turut mengontaminasi daerah lain. Gerakan konflik bersama dapat dimobilisir karena ada mobilitas massa secara bersama. Terlebih lagi perhatian penangkai Pemiluakad-terpusat ke daerah, tanpa saling berkoordinasi antar lintas daerah Pemiluakada, atau melihat

potensi konflik lintas daerah memungkinkan bertransformasi ke daerah Pemiluakada lain.

Keterbukaan adanya konflik juga tidak terlepas kembali implikasi dari kelemahan material pemangku kepentingan Pemiluakada itu sendiri (KPU, pemerintah, Poldas, masyarakat dan *stakeholder* lainnya). Tidak netralnya Komisi Pemilihan umum (KPU), dan masih ditemukannya daftar pemilih tetap bermasalah serta permasalahan lainnya, seharusnya bukan lagi satu alasan. Netralitas, kematangan, profesionalitas KPU semakin dituntut untuk mekecepatkan nilai-nilai demokrasi. Integritas, akuntabilitas dan transparansi merupakan harga mati bagi KPU. Penyelenggaraan terukur pada Pemiluakada serentak harapan baru terwujudnya kematangan demokrasi ada di tangan KPU. Selain KPU, Poldas sebagai penggiat Pemiluakada semakin dituntut meningkatkan upaya preventif dan penegakan hukum. Peran yang dimainkan Poldas harus dilakukan secara dini dengan kemampuan kecepatan mengidentifikasi potensi konflik, kemudian berkoordinasi, bersinergi untuk diantisipasi.

Selanjutnya partai politik (Parpol) sebagai pilar utama penyanga Pemiluakada juga menjadi elemen penting membangun kondusifitas Sumut. Terlebih kompetisi politik itu sebenarnya berada di Parpol, mulai dari proses pendaftaran, penetapan calon, Parpol juga menciptakan hubungan kuat dengan konstituen, apalagi calon kepala daerah adalah kader Parpol. Maka prinsip reformasi dan modernisasi Parpol mengabdikan Parpol melakukan pendidikan politik terhadap konstituen dan masyarakat. Parpol mendorong kebebasan masyarakat memutuskan preferensi politik mereka melalui jalur perserikatan, informasi dan komunikasi, memberikan ruang kom-petensi sehat melalui cara damai, serta tidak melarang siapapun berkompetensi untuk jabatan politik.

Dalam proses mencalonkan pasangan kepala daerah, Parpol melekatkan kekuatan sosial daerah dan agama menjadi pertimbangan tidak hanya faktor politik semata. Tidak

kalah pentingnya adalah akses penggunaan dana untuk lebih transparan memberikan laporan keuangan dan sumber keuangan. Kecemburuan selalu terjadi manakala Parpol dan calon kepala daerah karena memiliki uang banyak mudah melakukan *money politics* sehingga menciptakan keemburan kontestan lain yang relatif sedikit *cost* politik-nya. Ini dapat menyulut potensi konflik.

Begitu pula pemerintah, sebagai fasilitator dituntut berperan secara maksimal, jika tidak maksimal justru membuka ruang konflik. Pemerintahan akan memegang peran besar jika Pemiluakada mengalami konflik. Kesiapan pemerintah sudah terlihat dari pengalokasian dana penyelenggaraan, meskipun banyak kalangan menyarankan perlunya melakukan kajian serius penibahan regulasi terkait untuk menekan pendanaan Pemiluakada seperti kampanye dan lainnya. Langkah ini penting supaya Parpol tidak terjebak kartelisasi politik dan korupsi yang justru mencederai demokrasi. Kemudian persiapan pemerintah melakukan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring, evaluasi, advokasi terutama terkait data pemilih bersumber dari pemerintahan. Kita tidak mengingkari diolaknya Pemiluakada disebabkan data pemilih tidak mutakhir. Penutupan data adalah langkah penting antisipasi konflik Pemiluakada.

Pemangku Pemiluakada berikutnya adalah masyarakat meskipun sifatnya pasif, juga komponen penting membangun kondusifitas. Keterlibatan masyarakat didorong pada partisipasinya sebagai pemilih. Pada Pemiluakada sebelumnya menunjukkan angka partisipasi politik berkisar 50-71 persen belum mengalamipartisipasi signifikan. Pemiluakada kedepan mengharuskan partisipasi pemilih mengalamipeningkatan, ini tidak saja menjadi salah satu indikator keberhasilan demokrasi tetapi juga terfatinnya kepala daerah terintegritas menjadi pilihan masyarakat yang dapat membawaperubahan, kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan partisipasi pemilih menjadi tanggung jawab semua pihak di samping adanya inisiatif aktif secara bersama masyarakat itu sendiri.

Substansi Pemiluakada sesungguhnya menampilkankecenderungan kelompok elit pemegang kekuasaan ingin mempertahankan kekuasaannya dan kelompok elit lainnya berupaya untuk menggantikan kelompok elit yang berkuasa atas akomodasi tuntutan masyarakat. Di balik ini terjadi pertarungan antar berbagai kekuatan dengan modal sum-berta yang "tidak terbatas. Tujuan semata adalah "me ng", apalagi semua kontestan

merasa percaya diri pasti memenangkan Pemiluakada. Maka berbagai carapapun dilakukan meskipun untuk satu nilai demokrasi. Tantik menarik kepentingan suatu hal umum mulai dari kolektif, agama, suku, marga, profesi, organisasi dan lainnya.

Intensitas persaingan semakin meningkat, mobilisasi massa kepada calon tertentu dengan berbagai pendekatan juga meluas. Pada tahapan seperti ini cukup rentan konflik. Klimaksnya ketidakpuasan terhadap hasil akhir Pemiluakada, jika dikaitkan teori konflik *functionalism* terdapat konsep *deprivation* dan *sense of justice*, karena kekalahan menimbulkan perasaan dipertakutkan secara tidak adil. Semua Pemiluakada merupakan media demokrasi justru menjadi ajang konflik karena kuatnya sentimen primordialisme, klanalisme, dan etnosentrisisme setiap kontestan. Implikasinya jadinya daerah yang bertikai, berawal dari konflik politik kemudian meluas menjadi konflik SARA.

Realitas ini jelas mengancam kondusifitas daerah, apalagi Sumut terstabil dalam potret pluralistik kelompok etnis, bahasa daerah, tradisi, adat istiadat, seni budaya, agama, dan keberagaman organisasi (organisasi kemas-yarakatan, profesi, fungsional pemuda, wanita, organisasi kemasyarakatan keagamaan). Semua realitas ini menjadi kekuatan daerah mampu mengelola perbedaan berakir menjadi area potensial konflik. Inilah situasi ketidak-manpuan kita dalam menakar kondusifitas Pemiluakada. Kita berharap ini tidak akan terfatin apabila pemangku kepentingan Pemiluakada menjadi satu kesatuan untuk berfungsi dalam membangun demokrasi yang kondusif.

Upaya menakar kondusifitas tidak bermaksud mengevaluasi secara dini kinerja dari pemangku kepentingan Pemiluakada sedang berjalan. Tetapi adalah sebuah antisipasi besar mewaspadai konflik ini tidak terjadi. Belum ada satu riset menggambarkan apakah Pemiluakada serentak Sumut kondusif atau tidak. Atau jaminan suksesnya Pemiluakada benar-benar terukur dari pemangku kepentingan Pemiluakada, jika pun ada sifatnya pasial sebatas tahapan, pertahapan, padahal setiap tahapan benar-benar ditarik dengan indikator. Meminimalisir konflik pada Pemiluakada serentak menjadi pertarungan bersama untuk diarahkan, diantisipasi seawal mungkin, guna mengantarkan daerah ini pada Pilkada berkualitas. Semogal